

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Waluyo dalam penelitian Firman Bayu Aji (2021) pajak adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang untuk membayar sejumlah uang untuk kas negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (Aji, 2021).

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah. Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penerapan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Berbagai macam Pajak Daerah Tingkat I meliputi pajak atas kendaraan bermotor, biaya untuk perubahan nama pada kendaraan bermotor, serta pajak untuk bahan bakar kendaraan. Sementara itu, Pajak Daerah Tingkat II mencakup pajak yang

dikenakan pada hotel dan restoran, pajak untuk layanan hiburan, pajak atas iklan, pajak untuk penerangan jalan, pajak atas ekstraksi dan manajemen mineral non-logam, serta pajak atas penggunaan air tanah dan permukaan (Simbolon, 2023).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon

| Tahun | Pajak Daerah |
|--------------|---------------------|
| 2014 | 120.405.178.671 |
| 2015 | 139.383.807.966 |
| 2016 | 158.183.196.696 |
| 2017 | 186.141.938.461 |
| 2018 | 207.896.011.946 |
| 2019 | 213.572.238.616 |
| 2020 | 223.610.292.769 |
| 2021 | 263.053.751.571 |
| 2022 | 308.442.409.838 |
| 2023 | 328.673.702.993 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 2023

Rata-rata pencapaian target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon dari tahun 2014 hingga 2023 mencapai 12,57%. Ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang belum tergali sepenuhnya, membuat pencapaian target menjadi lebih mudah. Terdapat fluktuasi dalam peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya, yang tercatat dalam tabel, menunjukkan perlunya identifikasi dan analisis terhadap berbagai faktor, salah satunya faktor makroekonomi yang mempengaruhi dinamika pajak daerah (Arianto, 2014).

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah, salah satunya adalah aspek agregat. Dalam makroekonomi, aspek agregat mengacu pada pengukuran total atau keseluruhan dari berbagai variabel ekonomi dalam suatu negara atau wilayah. Berbeda dengan mikro ekonomi yang fokus pada perilaku individu atau perusahaan, makro ekonomi menganalisis perilaku ekonomi secara keseluruhan dengan menjumlahkan data

dari berbagai sektor dan pelaku ekonomi. Aspek agregat itu sendiri adalah sebagai berikut.

- Produk domestik bruto (PDB) : Total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. PDB merupakan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara.
- Tingkat Inflasi: Laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat dan menghalangi investasi.
- Pengangguran: Jumlah orang yang mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkannya. Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kerawanan sosial dan menurunkan produktivitas ekonomi.
- Suku Bunga: Biaya meminjam uang. Suku bunga yang tinggi dapat mengurangi investasi dan konsumsi, sedangkan suku bunga yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Neraca Pembayaran: Perbedaan antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa, serta aliran modal masuk dan keluar suatu negara. Neraca pembayaran yang defisit dapat membahayakan stabilitas nilai tukar mata uang.

Tujuan utama makro ekonomi adalah mencapai stabilitas ekonomi, yaitu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi stabil, tingkat inflasi rendah, pengangguran rendah, dan neraca pembayaran seimbang (Hasyim, 2017). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aspek agregat sebagai faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah yaitu inflasi, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Inflasi terjadi ketika daya beli masyarakat akan menurun (Parakassi, 2018). Inflasi dan pendapatan pajak daerah memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang dapat meningkatkan pendapatan dari pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN) karena nilai transaksi yang dikenakan pajak menjadi lebih tinggi. Namun, jika pendapatan riil masyarakat

tidak meningkat seiring dengan inflasi, daya beli akan menurun, yang bisa mengurangi konsumsi dan investasi serta berdampak negatif pada pendapatan pajak. Hal ini terjadi karena nilai uang yang dipegang masyarakat menjadi berkurang sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut menjadi lebih sedikit. Penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi dapat menurunkan konsumsi barang dan jasa. Konsumsi barang dan jasa yang menurun berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Ketika penjualan barang dan jasa menurun, maka penerimaan pajak daerah dari jenis pajak tersebut juga akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat Inflasi di Kabupaten Cirebon selama periode 2014-2023.

Tabel 1.2 Inflasi Kabupaten Cirebon

| Tahun | Pajak Daerah |
|--------------|---------------------|
| 2014 | 7,08 |
| 2015 | 1,56 |
| 2016 | 1,87 |
| 2017 | 4,36 |
| 2018 | 2,80 |
| 2019 | 2,00 |
| 2020 | 1,16 |
| 2021 | 1,81 |
| 2022 | 4,86 |
| 2023 | 3,22 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 2023

Terlihat pada tabel 1.2, inflasi dari kabupaten Cirebon sendiri mengalami fluktuasi. Dari 10 tahun terakhir, puncaknya berada pada tahun 2014 dengan tingkat inflasi mencapai 7,08%. Hal ini bisa dipengaruhi dari harga komoditas, kondisi ekonomi global, kebijakan moneter dari negara lain, kebijakan moneter dari Bank Indonesia, kebijakan fiskal pemerintah, kondisi pasokan dan permintaan dan juga dari ekspektasi inflasi.

Kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah pusat sebagai respons terhadap inflasi, seperti menaikkan suku bunga atau menyesuaikan transfer fiskal ke daerah, juga mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, mengurangi investasi di daerah, dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi lokal serta pendapatan pajak daerah.

Jumlah Penduduk adalah total jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu (Didu, 2016). Jumlah penduduk memiliki kaitan yang signifikan dengan pendapatan pajak daerah melalui berbagai mekanisme. Pertama, jumlah penduduk yang lebih besar umumnya berarti basis pajak yang lebih luas. Semakin banyak penduduk, semakin banyak individu dan bisnis yang berpotensi membayar pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak properti, pajak penjualan, atau berbagai bentuk pajak lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Dengan populasi yang lebih besar, konsumsi barang dan jasa juga cenderung meningkat. Hal ini meningkatkan pendapatan dari pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai (PPN) karena lebih banyak transaksi ekonomi yang terjadi. Selain itu, dengan lebih banyak penduduk yang bekerja dan memiliki penghasilan, pendapatan dari pajak penghasilan juga berpotensi meningkat.

Populasi yang lebih besar seringkali membutuhkan lebih banyak perumahan dan properti komersial, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari pajak properti. Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan dapat mendorong perkembangan properti baru, yang memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah melalui pajak real estate dan pajak transfer properti.

Selain itu, daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak bisnis dan industri. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dari pajak bisnis, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, yang

meningkatkan pendapatan pajak dari pekerja yang dipekerjakan oleh bisnis tersebut.

Jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan pengeluaran ini bisa mengimbangi atau bahkan melebihi peningkatan pendapatan pajak. Peningkatan jumlah penduduk juga bisa memicu urbanisasi yang cepat, yang mungkin memerlukan investasi besar dalam perencanaan kota dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pertumbuhan penduduk didukung oleh pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan pajak dan pengeluaran publik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan Jumlah Penduduk di Kabupaten Cirebon selama periode 2014-2023.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk |
|--------------|------------------------|----------------------------------|
| 2014 | 2.109,60 | 0,79 |
| 2015 | 2.126,20 | 0,79 |
| 2016 | 2.143,00 | 0,79 |
| 2017 | 2.159,60 | 1,23 |
| 2018 | 2.176,20 | 1,19 |
| 2019 | 2.189,79 | 1,19 |
| 2020 | 2.270,62 | 0,91 |
| 2021 | 2.290,97 | 1,20 |
| 2022 | 2.315,42 | 1,52 |
| 2023 | 2.360,44 | 1,42 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 2023

Terlihat pada tabel 1.3, meskipun Jumlah Penduduk mengalami kenaikan, hal itu sejalan dengan naiknya angka Pajak Daerah Kabupaten Cirebon. Dalam beberapa kasus, peningkatan jumlah penduduk dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah, kemungkinan penerimaan pajak daerah meningkat bersamaan dengan kenaikan jumlah penduduk juga dapat terjadi.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun (Karlina, 2017).

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan pendapatan pajak daerah melalui beberapa mekanisme utama. Ketika ekonomi daerah tumbuh, pendapatan individu dan perusahaan cenderung meningkat. Peningkatan pendapatan ini berkontribusi pada peningkatan pajak penghasilan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, perusahaan yang lebih menguntungkan akan membayar lebih banyak pajak bisnis atau pajak perusahaan, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

Pertumbuhan ekonomi juga menarik investasi baru ke daerah tersebut. Investasi dalam properti, infrastruktur, dan bisnis baru meningkatkan basis pajak properti dan pajak bisnis. Proyek pembangunan yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi juga bisa dikenakan pajak tertentu yang menambah pendapatan daerah. Pengembangan infrastruktur publik, seperti jalan dan fasilitas umum, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga meningkatkan nilai properti, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari pajak properti.

Pertumbuhan ekonomi biasanya mengurangi tingkat pengangguran. Lebih banyak orang yang bekerja berarti lebih banyak orang yang membayar pajak penghasilan, yang meningkatkan pendapatan pajak daerah. Peningkatan lapangan kerja juga berarti lebih sedikit pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial dan lebih banyak pendapatan dari pajak konsumsi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon selama periode 2014-2023.

Pertumbuhan ekonomi juga menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur. Pertumbuhan ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa

peningkatan pendapatan pajak dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon

| Tahun | PDRB | Laju Pertumbuhan Ekonomi |
|--------------|-------------|---|
| 2014 | 32.579,05 | 5,07 |
| 2015 | 35.734,65 | 4,88 |
| 2016 | 38.840,77 | 5,63 |
| 2017 | 41.919,28 | 5,10 |
| 2018 | 45.499,27 | 5,02 |
| 2019 | 49.135,80 | 4,68 |
| 2020 | 49.561,30 | 1,08 |
| 2021 | 52.309,97 | 2,47 |
| 2022 | 56.653,64 | 4,09 |
| 2023 | 61.309,76 | 4,85 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 2023

Terlihat pada tabel diatas, bahwasannya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurun pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena terjadinya wabah yang melanda Indonesia yaitu Covid-19 yang berdampak hingga tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kembali, hasilnya terbukti pada tahun 2022 yang meningkat lagi menjadi 4,09%.

Penelitian terkait makro ekonomi dengan Pendapatan Pajak Daerah ini, berfokus pada tingkat lokal, dan juga melihat bagaimana ketiga faktor tersebut dapat berdampak pada Pendapatan Pajak Daerah dalam jangka panjang dan bagaimana hasilnya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan pembangunan terutama pada wilayah Kabupaten Cirebon.

Akan tetapi, belum banyak penelitian yang mengkaji pengaruh dari faktor makro ekonomi tersebut. Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang faktor ekonomi mikro dan sektor spesifik seperti penelitian Muhammad Tahwin (2013) yang meneliti tentang pendapatan perkapita, jumlah wisatawan dan c

produk pertambangan kelas kamar terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang periode 1992-2008. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, jumlah wisatawan dan c produk pertambangan kelompok memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Jumlah industri dan hotel pemesanan kamar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kabupaten rembang. Variabel pendapatan per kapita memberikan pengaruh dominan terhadap lokal pajak penghasilan Kabupaten Rembang. Selain itu juga banyak penelitian lain yang membahas faktor yang mempengaruhi potensi dan realisasi pajak seperti pada penelitian Reza Nanda Putra (2017) yang meneliti tentang pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2016. Hasil uji regresi mengindikasikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sementara pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

Dari kedua penelitian tersebut, tidak ada yang menggunakan faktor makroekonomi dalam penelitiannya, dan juga tidak menggunakan data dari tahun 2014-2023, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini perkembangan Pendapatan Pajak Daerah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2023”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pajak Daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi besaran dan pengelolaan pajak daerah. Faktor-faktor itu seperti kebijakan pemerintah daerah, potensi ekonomi daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, infrastruktur dan fasilitas publik, sistem administrasi pajak, peraturan perundang-undangan, kondisi sosial, demografi serta stabilitas politik keamanan, selain itu juga pajak daerah dipengaruhi oleh faktor makroekonomi.

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak luas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada variabel makro ekonomi yang terdiri dari Inflasi, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Pajak Daerah.

3. Rumusan Masalah

- a. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023?
- b. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023?
- c. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023?
- d. Apakah Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023.

2. Manfaat Penelitian

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat guna menambah wawasan penulis tentang Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi.
- Bagi akademis khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Nur Jati Kota Cirebon yaitu sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.
- Bagi praktisi, untuk memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian terkait Inflasi, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak Daerah

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang relevan dalam penulisan penelitian ini seperti Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi serta pengertian Pajak Daerah. Pada bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan tempat penelitian data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan masing-masing operasional variabel, hasil dari pengujian dan juga pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari sebuah penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis untuk para pembaca

